

DAFTAR PUSTAKA

- Amran, A. A. H., Idrus, M., & Mappangara, A. S. C. (2021). *Facility Integration for Handling Container at the Makassar New Port. Development*, 755, 226-583.
- Amstrong, Baron, Michael dan Angela. 2007. *Manajemen Kinerja*. Edisi Ketiga. Terjemahan Wibowo. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Jeneponto dalam angka*. Jeneponto : Badan Pusat Statistik.
- Guckian, W.J. 1970. *The Planning and Preparatory Work for a Fishery Harbour Development Project*. London.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 tentang Perikanan*, Tambahan Lembar RI Nomor 4433. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan*, Tambahan Lembaran RI Nomor 151. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Junaedi. 2002. *Ballanced Scorecard*. Pengukuran Kinerja pada Pemerintah Daerah. Kompak.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2015. *Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 20/KEP-DJPT/2015*. Jakarta : Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Kementerian Perhubungan. 2002. *Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 53 Tahun 2002*. Jakarta : Kementerian Perhubungan.
- Kementerian Perhubungan. 2002. *Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2002*. Jakarta : Kementerian Perhubungan.
- Kementerian Perhubungan. 2012. *Port Operational Service Performance*.
<https://www.dephub.go.id>
- Lasse, D.A. 2011. *Manajemen Kepelabuhanan*. Jakarta: NIKA.
- Lubis, E. 2012. *Pelabuhan Perikanan*. Bogor: IPB.
- Magdalena, Renny. 2019. *Strategi Peningkatan Kinerja Operasional Pelabuhan Nusantara Sungailiat*. Tangerang: Universitas Terbuka.

Mudzakir, A. K. 2011. *Analisis Program dan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan*. Semarang: Undip.

Rahadi. 2010. *Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia Cetakan Kesatu*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.

Triatmodjo, B. 2010. *Perencanaan Pelabuhan*. Yogyakarta: Beta Offset.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

KUISIONER PENELITIAN

Identitas Responden

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Jabatan :

Petunjuk Pengisian

Berikan penilaian pada kolom di bawah sesuai dengan skala yang ditentukan berdasarkan kondisi yang anda rasakan dan alami.

PARAMETER ADMINISTRASI & SISTEM INFORMASI	SKALA (S)	STANDAR INDIKATOR PPI	SKALA PENILAIAN PPI TANRU SAMPE
Realisasi Penyerapan Anggaran	4	antara 75%-100%	
	3	antara 50%-75%	
	2	antara 25%-50%	
	1	<25%	
Pendapatan Pelabuhan	4	diatas 90% dari target	
	3	antara 60%-90% dari target	
	2	antara 30%-60% dari target	
	1	<30% dari target	
Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan	4	Lengkap (data SDM, dasar hukum kelembagaan, struktur organisasi)	
	3	kurang lengkap	
	1	tidak ada	

KUISIONER PENELITIAN

Identitas Responden

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Jabatan :

Petunjuk Pengisian

Berikan penilaian pada kolom di bawah sesuai dengan skala yang ditentukan berdasarkan kondisi yang anda rasakan dan alami.

PARAMETER FASILITAS PELABUHAN PERIKANAN	SKALA (S)	STANDAR INDIKATOR PPI	SKALA PENILAIAN PPI TANRU SAMPE
Kapasitas daya tampung kolam pelabuhan	4	>75 GT	
	3	antara 50-75 GT	
	2	antara 25-50 GT	
Panjang Dermaga	4	diatas 50 m	
	3	antara 34-50 m	
	2	antara 17-34 m	
Kedalaman Kolam	4	diatas 2 m	
	3	antara 1-2 m	
	2	antara 50 cm - 1 m	
Sarana Perbaikan (Docking, bengkel)	4	ada	
	1	tidak ada	
Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & Distribusi Ikan	4	lengkap (pasar, TPI, kendaraan berpendingin, peralatan pemasaran)	
	3	sedang	
	2	kurang	
	1	tidak ada	
Ketersediaan Lahan Pelabuhan	4	diatas 2 ha	
	3	antara 1-2 ha	
	2	antara 0,5 sampai 1 ha	
	1	kurang dari 0,5 ha	

KUISIONER PENELITIAN

Identitas Responden

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Jabatan :

Petunjuk Pengisian

Berikan penilaian pada kolom di bawah sesuai dengan skala yang ditentukan berdasarkan kondisi yang anda rasakan dan alami.

PARAMETER PELAYANAN UMUM	SKALA (S)	STANDAR INDIKATOR PPI	SKALA PENILAIAN PPI TANRU SAMPE
Pelayanan Tambat Labuh	4	> 5 GT	
	3	antara 2-5 GT	
	2	<2 GT	
Produksi Perikanan	4	> 2 ton per hari	
	3	1-2 ton perhari	
	2	< 1 GT	
	1	tidak melaporkan	
Frekuensi Kunjungan Kapal	4	> 7 unit	
	3	5-7 unit	
	2	2-4 unit	
	1	1 unit	
Sosialisasi dan Bimbingan teknis	4	diatas 3	
	3	3 kali	
	2	2 kali	
	1	tidak ada	
fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah	4	lebih dari 4 kegiatan	
	3	3-4 kegiatan	
	2	1-2 kegiatan	
	1	tidak ada	
Pelaksanaan K5	4	baik	
	3	sedang	
	2	kurang	
	1	sangat kurang	
Penyaluran Air Bersih	4	sesuai kebutuhan (100%)	
	3	antara 75-99% dari kebutuhan	
	2	antara 50-74% dari kebutuhan	
	1	kurang dari 50% dari kebutuhan	
Penyaluran Es (kapal)	4	sesuai kebutuhan (100%)	
	3	antara 75-99% dari kebutuhan	
	2	antara 50-74% dari kebutuhan	
	1	kurang dari 50% dari kebutuhan	
Penyaluran BBM (kapal)	4	sesuai kebutuhan (100%)	
	3	antara 75-99% dari kebutuhan	
	2	antara 50-74% dari kebutuhan	
	1	kurang dari 50% dari kebutuhan	

KUISIONER PENELITIAN

Identitas Responden

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Jabatan :

Petunjuk Pengisian

Berikan penilaian pada kolom di bawah sesuai dengan skala yang ditentukan berdasarkan kondisi yang anda rasakan dan alami.

PARAMETER INVESTASI & INDUSTRI	SKALA (S)	STANDAR INDIKATOR PPI	SKALA PENILAIAN PPI TANRU SAMPE
Pelayanan pengolahan hasil perikanan di WKOPP	4	diatas 2 unit	
	3	2 unit	
	2	1 unit	
	1	tidak ada	
Pemanfaatan lahan pelabuhan	4	sangat optimal (80-100%)	
	3	optimal (60-79%)	
	2	cukup optimal (40-59%)	
	1	kurang optimal (<40%)	
Penyerapan Tenaga Kerja	4	diatas 150 orang perbulan	
	3	antara 100-150 orang perbulan	
	2	antara 50-100 orang perbulan	
	1	kurang dari 50 orang/bulan	

LAMPIRAN 2



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
NOMOR 20/KEP-DJPT/2015
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI KINERJA OPERASIONAL
PELABUHAN PERIKANAN
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penetapan kebijakan dalam pengembangan, pembangunan, pengelolaan pelabuhan perikanan, dilakukan Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan;
- b. bahwa selubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan;
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. KEP.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan

	MEMUTUSKAN
Menetapkan	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TENTANG PEDOMAN EVALUASI KINERJA OPERASIONAL PELABUHAN PERIKANAN.
KESATU	Menetapkan Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dictum KESATU merupakan acuan bagi Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam melaksanakan evaluasi kinerja operasional pelabuhan perikanan.
KETIGA	Dalam melaksanakan evaluasi kinerja operasional pelabuhan perikanan, Direktur Pelabuhan Perikanan wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
KEEMPAT	Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 432/DPT3/OT.220/I/2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Jakarta
Tanggal : 13 April 2015

**DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN
TANGKAP**

Ttd

GELL WYNN JUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas

Heru Satrio Wibowo



Direktorat Pelabuhan Perikanan berupaya mencari berbagai terobosan dan menciptakan program yang diharapkan akan membawa perubahan serta memberikan jawaban terhadap permasalahan dan tantangan ke depan.

Pemantauan dan Evaluasi kinerja operasional pelabuhan perikanan merupakan bagian dari kegiatan manajemen, untuk menilai kinerja dari pelabuhan perikanan yang terbukti secara konkret dapat diukur dan dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja operasional ini sangat dibutuhkan untuk memberikan gambaran kinerja suatu pelabuhan perikanan dan hasilnya dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang akan diambil terhadap pelabuhan perikanan yang dikelola Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sehingga keberadaannya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh nelayan dan stakeholders lainnya.

Salah satu cara untuk menilai indikator kinerja pelabuhan perikanan sesuai standar yang telah ditetapkan adalah dengan mengumpulkan laporan operasional dan sekaligus mengevaluasi hasil laporan kegiatan yang ada di masing-masing pelabuhan. Untuk mengevaluasi hal tersebut, Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam hal ini sebagai pembina langsung pengelola pelabuhan perikanan perlu membuat Pedoman Evaluasi Kinerja Pelabuhan Perikanan dengan standar kriteria untuk menilai tingkat operasional pelabuhan perikanan.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi kinerja pelabuhan perikanan. Tujuan disusunnya pedoman evaluasi kinerja pelabuhan perikanan ini untuk penyusunan



LAMPIRAN:
 KEPUTUSAN DIREKTUR
 JENDERAL PERIKANAN
 TANGKAP NOMOR 20/KEP-
 DJPT/2015 TENTANG
 PEDOMAN EVALUASI
 KINERJA OPERASIONAL
 PELABUHAN PERIKANAN.

PEDOMAN EVALUASI KINERJA OPERASIONAL PELABUHAN PERIKANAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menunjang perkembangan perikanan di Indonesia, banyak program pembangunan dilaksanakan diantaranya pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan. Pelabuhan Perikanan merupakan salah satu komponen penting dalam pengembangan industri perikanan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perikanan, pelabuhan perikanan secara berkala perlu dilakukan evaluasi tingkat operasionalnya. Pembangunan dan pembinaan pelabuhan perikanan selama ini menjadi tanggung jawab Pemerintah, sehingga kinerja dalam pengelolaan pelabuhan perikanan perlu dievaluasi.

Pelabuhan perikanan tentara menjadi salah satu perhatian utama aktivitas perikanan tangkap dimana pelabuhan perikanan harus memperhatikan aspek kualitas maupun kuantitas. Pengelolaan pelabuhan perikanan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup nelayan, meningkatkan penerimaan negara, mendorong perluasan dan kesempatan kerja serta peningkatan daya saing. Melihat kondisi operasional pelabuhan perikanan saat ini, maka kebijakan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada pengguna jasa di pelabuhan perikanan.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan ini diperlukan untuk memberikan gambaran kinerja suatu pelabuhan perikanan. Ruang lingkup yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pengelolaan pelabuhan perikanan dalam Pedoman Evaluasi Kinerja Pelabuhan Perikanan ini meliputi :

1. Administrasi dan Sistem Informasi
2. Fasilitas Pelabuhan Perikanan
3. Pelayanan Umum

4. Investasi dan Industri

D. Pengertian

Dalam pedoman ini dimaksud dengan :

1. **Pelabuhan Perikanan** adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang Perikanan;
2. **Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelabuhan Perikanan** adalah Pelabuhan Perikanan yang kewenangan dan pengelolaannya di bawah Pemerintah Pusat (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap);
3. **Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah Pelabuhan Perikanan** adalah Pelabuhan Perikanan yang kewenangan dan pengelolaannya di bawah Pemerintah Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota);
4. **Kriteria Indikator** adalah tolok ukur yang digunakan untuk mengukur dan menilai keberhasilan pengelolaan pelabuhan perikanan;
5. **Evaluasi** adalah proses penilaian terhadap kinerja kebijakan/program dalam mencapai tujuan dan sasaran;
6. **Kinerja** adalah hasil kerja dari instansi yang diukur sesuai standar yang dapat diukur sesuai standar yang telah ditetapkan;
7. **Evaluasi Kinerja** adalah merupakan kegiatan manajemen untuk menilai hasil kerja dari pelabuhan perikanan yang terbukti secara konkret dapat diukur dan dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan;
8. **Nilai Keberhasilan (NK)** adalah realisasi dibagi dengan standar indikator dikalikan bobot penilaian;
9. **Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)** adalah merupakan sistem informasi yang meliputi pengumpulan, pengelolaan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi pelabuhan perikanan.
10. **Surat Persetujuan Berlayar (SPB)** adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, laik tangkap, dan laik simpan.
11. **Surat Keterangan Hasil Inspeksi Pembongkaran Ikan (SKH – IPI)** adalah surat yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan yang menyatakan bahwa kapal ikan yang bersangkutan telah diperiksa pada saat pembongkaran ikan, baik dari kapal penangkap ikan

dan kapal pengangkut ikan maupun dari alat transportasi darat, yang melakukan pembongkaran ikan di pelabuhan perikanan.

12. **Sistem Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK)** adalah surat yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan yang menyatakan bahwa kapal yang bersangkutan telah berada di pelabuhan perikanan dan telah melapor kepada petugas Syahbandar perikanan.
13. **Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)** adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa hasil perikanan yang diekspor bukan dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing.
14. **Surat Keterangan Pendaratan Ikan (SKPI)** adalah surat yang menyatakan bahwa hasil tangkapan ikan yang didaratkan bukan berasal dari kegiatan IUU Fishing.
15. **Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)** adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
16. **Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP)** adalah wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan Perikanan.



BAB II

PENILAIAN EVALUASI KINERJA PELABUHAN PERIKANAN

Untuk menilai dan mengevaluasi kinerja suatu pelabuhan perikanan didasarkan pada (i) metode evaluasi kinerja pelabuhan perikanan, (ii) tolok ukur kriteria dan (iii) kinerja penilaian.

A. Metode Evaluasi Kinerja Pelabuhan Perikanan

Metode evaluasi kinerja pelabuhan perikanan menggunakan metode pembobotan (*scoring method*) yang mengacu kepada indikator yang telah ditetapkan baik sebagai tolok ukur kriteria maupun standar volumenya. Indikator ini merupakan indikator pencapaian secara mikro yakni untuk menjabarkan evaluasi kinerja pelabuhan perikanan secara lebih rinci per kelas pelabuhan perikanan. Dari data yang ada (dilaporkan) berdasarkan realisasi pencapaian dibandingkan dengan standar indikator akhirnya diketahui hasil penilaian akhir yaitu berupa nilai keberhasilan. Nilai ini yang dijadikan tolok ukur dalam mengevaluasi Pelabuhan Perikanan. Adapun waktu pelaksanaan evaluasi dilakukan secara bulanan, triwulan ataupun tahunan sesuai dengan tolok ukurnya.

B. Tolok Ukur Kriteria

Tolok ukur kriteria yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pengelolaan pelabuhan perikanan dalam pedoman ini dibedakan dalam beberapa kriteria antara lain :

1. Administrasi dan Sistem Informasi
 - 1) PPIP
 - 2) E-logbook
 - 3) Aplikasi SPB-Online
 - 4) SHTI
 - 5) Aplikasi Inspeksi Pembongkaran Ikan
 - 6) SISKA
 - 7) Realisasi Penyerapan Anggaran
 - 8) Pendapatan Pelabuhan Perikanan
 - 9) Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan
2. Fasilitas Pelabuhan Perikanan
 - 1) Kapasitas daya tampung kapal perikanan
 - 2) Panjang dermaga
 - 3) Kedalaman kolam
 - 4) Sarana perbaikan (*docking, bengkel*)
 - 5) Kelengkapan fasilitas pemasaran dan distribusi ikan
 - 6) Ketersediaan lahan Pelabuhan
3. Pelayanan Publik
 - 1) Pelayanan Tambat Labuh
 - 2) Produksi Perikanan
 - 3) Frekuensi kunjungan kapal
 - 4) STBLIK

- 5) Fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan;
- 6) Pelayanan K5
- 7) Penyaluran Air Bersih (kapal dan industri pengolahan)
- 8) Penyaluran es (kapal)
- 9) Penyaluran BBM (kapal)

4. Investasi dan Industri:

- 1) Pelayanan pengolahan hasil perikanan di WKOPP
- 2) Pemanfaatan lahan pelabuhan (sesuai Rencana Induk)
- 3) Penyerapan Tenaga Kerja

Untuk lebih jelasnya tolok ukur yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pengelolaan pelabuhan perikanan dapat disajikan pada tabel berikut :



PARAMETER	Waktu Penilaian	PIC	BOBOT (B)	SKALA (S)	Nilai (BxS)/4	STANDAR INDIKATOR			
						PPS	PPN	PPP	PPI
ADMINISTRASI & SISTEM INFORMASI			26						
PIPP	bulanan	Semua	4	4	4	ya	ya	ya	
				1	1	tidak	tidak	tidak	
e-logbook	bulanan	Tata Operasional	2	4	2	ya	ya	ya	
				1	0,5	tidak	tidak	tidak	
Aplikasi SPB-online	bulanan	Tata Operasional	2	4	2	ya	ya	ya	
				1	0,5	tidak	tidak	tidak	
SHTI	bulanan	Tata Operasional	2	4	2	ya	ya	ya	
				1	0,5	tidak	tidak	tidak	
Aplikasi Inspeksi Pembongkaran Ikan	bulanan	Tata Operasional	2	4	2	ya	ya	ya	
				1	0,5	tidak	tidak	tidak	
SISKA	bulanan	Tata Operasional	2	4	2	ya	ya	ya	
				1	0,5	tidak	tidak	tidak	
Realisasi Penyerapan Anggaran	tahunan	Tata Usaha	4	4	4	antara 75%-100%	antara 75%-100%	antara 75%-100%	antara 75%-100%
				3	3	antara 50%-75%	antara 50%-75%	antara 50%-75%	antara 50%-75%
				2	2	antara 25%- 50 %	antara 25%- 50 %	antara 25%- 50 %	antara 25%- 50 %
				1	1	< 25%	< 25%	< 25%	< 25%
Pendapatan Pelabuhan	tahunan	Tata Usaha	4	4	4	dias 90% dari target	dias 90% dari target	dias 90% dari target	dias 90% dari target
				3	3	antara 60%-90% dari target	antara 60%-90% dari target	antara 60%-90% dari target	antara 60%-90% dari target
				2	2	antara 30%-60%	antara 30%-60%	antara 30%-60%	antara 30%-60%
				1	1	<30% dari target	<30% dari target	<30% dari target	<30% dari target
Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan	tahunan	Tata Usaha	4	4	4	Lengkap (data SDM, dasar hukum kelembagaan, struktur organisasi)	Lengkap (data SDM, dasar hukum kelembagaan, struktur organisasi)	Lengkap (data SDM, dasar hukum kelembagaan, struktur organisasi)	Lengkap (data SDM, dasar hukum kelembagaan, struktur organisasi)
				3	3	Kurang lengkap	Kurang lengkap	Kurang lengkap	Kurang lengkap
				1	1	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

PARAMETER	Waktu Penilaian	PIC	BOBOT (B)	SKALA (S)	Nilai (BxS)/4	STANDAR INDIKATOR			
						PPS	PPN	PPP	PPI
FASILITAS PELABUHAN PERIKANAN			20						
Kapasitas daya tampung kolam pelabuhan	Bulanan	tata kelola dan pelayanan usaha	4	4	4	diatas 6.000 GT	diatas 2.250 GT	diatas 300 GT	> 75 GT
				3	3	antara 4.000-6.000 GT	antara 1.500-2.250 GT	antara 200-300 GT	antara 50 -75 GT
				2	2	antara 2.000-4.000 GT	antara 750-1500 GT	antara 100 -200 GT	antara 25-50 GT
Panjang Dermaga	tahunan	tata kelola dan pelayanan usaha	4	4	4	diatas 300 GT	diatas 150 m	diatas 100 m	diatas 50 m
				3	3	antara 200-300 GT	antara 100-150 m	antara 66-100 m	antara 34-50 m
				2	2	antara 100-200 GT	antara 50-100 m	antara 33-66 m	antara 17-34 m
Kedalaman Kolam	tahunan	tata kelola dan pelayanan usaha	4	4	4	diatas 3m	diatas 3m	diatas 2 m	diatas 2 m
				3	3	antara 2-3 m	antara 2-3 m	antara 1-2 m	antara 1-2 m
				2	2	antara 1 - 2 m	antara 1 - 2 m	antara 50 cm -1 m	antara 50 cm -1 m
Sarana perbaikan (Docking, bengkel)	tahunan	tata kelola dan pelayanan usaha	2	4	2	ada	ada	ada	ada
				1	0,5	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
Kelengkapan fasilitas pemasaran & distribusi ikan	tahunan	tata kelola dan pelayanan usaha	2	4	2	Lengkap (pasar, TPI, kendaraan berpendingin, peralatan pemasaran)	Lengkap (pasar, TPI, kendaraan berpendingin, peralatan pemasaran)	Lengkap (pasar, TPI, kendaraan berpendingin, peralatan pemasaran)	Lengkap (pasar, TPI, kendaraan berpendingin, peralatan pemasaran)
				3	1,5	sedang	sedang	sedang	sedang
				2	1	kurang	kurang	kurang	kurang
				1	0,5	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Ketersediaan lahan pelabuhan	tahunan	tata kelola dan pelayanan usaha	4	4	4	diatas 20 ha	diatas 10 ha	diatas 5	diatas 2 ha
				3	3	antara 10-20 ha	antara 6 -10 ha	antara 3-5 ha	antara 1 - 2 ha
				2	2	antara 5-10 ha	antara 3 - 6 ha	antara 1,5 - 3 ha	antara 0,5 sampai 1 ha
				1	1	kurang dari 5 ha	kurang dari 3 ha	kurang dari 1,5 ha	kurang dari 0,5 ha
PELAYANAN UMUM			45						
Pelayanan Tambat labuh	Bulanan	tata operasional dan kesyahbandaran	5	4	5	> 60 GT	> 30 GT	> 10 GT	> 5 GT
				3	3,75	antara 30-60 GT	antara 10-30 GT	antara 5-10 GT	antara 2-5 GT
				2	2,5	≤ 30 GT	≤ 10 GT	≤ 5 GT	≤ 2 GT

PARAMETER	Waktu Penilaian	PIC	BOBOT (B)	SKALA (S)	Nilai (BxS)/4	STANDAR INDIKATOR			
						PPS	PPN	PPP	PPI
Produksi Perikanan	Bulanan	tata operasional dan kesyahbandaran	5	4	5	> 50 ton per hari	> 30 ton per hari	> 5 ton per hari	> 2 ton per hari
				3	3,75	Antara 30-50 ton per hari	5-30 ton per hari	2- 5 ton per hari	1-2 ton per hari
				2	2,5	< 30 GT	< 3 GT	< 2 GT	< 1 GT
				1	1,25	Tidak melaporkan	Tidak melaporkan	Tidak melaporkan	Tidak melaporkan
Frekuensi kunjungan kapal	bulanan	tata operasional dan kesyahbandara	5	4	5	> 14 unit	> 12 unit	> 10 unit	> 7 unit
				3	3,75	10 - 14unit	9 - 12unit	7 - 10unit	5 - 7 unit
				2	2,5	5-9 unit	4-8 unit	3-6 unit	2-4 unit
				1	1,25	1- 4 unit	1- 3 unit	1- 2 unit	1 unit
STBLKK	bulanan	tata operasional dan kesyahbandara	5	4	5	STBLKK / kapal yang masuk antara 100%	STBLKK / kapal yang masuk antara 100%	STBLKK / kapal yang masuk antara 100%	
				3	3,75	STBLKK / kapal yang masuk antara 75-99 %	STBLKK / kapal yang masuk antara 75-99 %	STBLKK / kapal yang masuk antara 75-99 %	
				2	2,5	STBLKK / kapal yang masuk antara 50 -74 %	STBLKK / kapal yang masuk antara 50 -74 %	STBLKK / kapal yang masuk antara 50 -74 %	
				1	1,25	STBLKK / kapal yang masuk kurang dari 50 %	STBLKK / kapal yang masuk kurang dari 50 %	STBLKK / kapal yang masuk kurang dari 50 %	
Sosialisasi dan bimbingan teknis	tahunan	tata kelola dan pelayanan usaha	4	4	4	diatas 3	diatas 3m	diatas 300 GT	diatas 3
				3	3	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali
				2	2	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
				1	1	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan;	tahunan	tata kelola dan pelayanan usaha	4	4	4	lebih dari 4 kegiatan	lebih dari 4 kegiatan	lebih dari 4 kegiatan	lebih dari 4 kegiatan
				3	3	3-4 kegiatan	3-4 kegiatan	3-4 kegiatan	3-4 kegiatan
				2	2	1-2 kegiatan	1-2 kegiatan	1-2 kegiatan	1-2 kegiatan
				1	1	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
Pelaksanaan K5	tahunan	Tata Usaha	4	4	4	Baik	Baik	Baik	Baik
				3	3	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
				2	2	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang
				1	1	sangat kurang	sangat kurang	sangat kurang	sangat kurang

PARAMETER	Waktu Penilaian	PIC	BOBOT (B)	SKALA (S)	Nilai (BxS)/4	STANDAR INDIKATOR			
						PPS	PPN	PPP	PPI
Penyaluran Air Bersih (kapal dan industri pengolahan)	bulanan	tata kelola dan pelayanan usaha	4	4	4	sesuai kebutuhan (100%)	sesuai kebutuhan (100%)	sesuai kebutuhan (100%)	sesuai kebutuhan (100%)
				3	3	antara 75-99 % dari kebutuhan	antara 75-99 % dari kebutuhan	antara 75-99 % dari kebutuhan	antara 75-99 % dari kebutuhan
				2	2	antara 50- 74 % dari kebutuhan	antara 50- 74 % dari kebutuhan	antara 50- 74 % dari kebutuhan	antara 50- 74 % dari kebutuhan
				1	1	kurang dari 50 % dari kebutuhan	kurang dari 50 % dari kebutuhan	kurang dari 50 % dari kebutuhan	kurang dari 50 % dari kebutuhan
Penyaluran Es (kapal)	Bulanan	tata kelola dan pelayanan usaha	4	4	4	sesuai kebutuhan (100%)	sesuai kebutuhan (100%)	sesuai kebutuhan (100%)	sesuai kebutuhan (100%)
				3	3	antara 75-99 % dari kebutuhan	antara 75-99 % dari kebutuhan	antara 75-99 % dari kebutuhan	antara 75-99 % dari kebutuhan
				2	2	antara 50- 74 % dari kebutuhan	antara 50- 74 % dari kebutuhan	antara 50- 74 % dari kebutuhan	antara 50- 74 % dari kebutuhan
				1	1	kurang dari 50 % dari kebutuhan	kurang dari 50 % dari kebutuhan	kurang dari 50 % dari kebutuhan	kurang dari 50 % dari kebutuhan
Penyaluran BBM (kapal)	Bulanan	tata kelola dan pelayanan usaha	5	4	5	sesuai kebutuhan (100%)	sesuai kebutuhan (100%)	sesuai kebutuhan (100%)	sesuai kebutuhan (100%)
				3	3,75	antara 75-99 % dari kebutuhan	antara 75-99 % dari kebutuhan	antara 75-99 % dari kebutuhan	antara 75-99 % dari kebutuhan
				2	2,5	antara 50- 74 % dari kebutuhan	antara 50- 74 % dari kebutuhan	antara 50- 74 % dari kebutuhan	antara 50- 74 % dari kebutuhan
				1	1,25	kurang dari 50 % dari kebutuhan	kurang dari 50 % dari kebutuhan	kurang dari 50 % dari kebutuhan	kurang dari 50 % dari kebutuhan
INVESTASI & INDUSTRI			9						
Pelayanan pengolahan hasil perikanan di WKOPP	tahunan	tata kelola dan pelayanan usaha	3	4	3	diatas 30 unit	diatas 15 unit	diatas 6 unit	diatas 2 unit
				3	2,25	antara 20-30 unit	antara 10-15 unit	antara 4-6 unit	2 unit
				2	1,5	antara 10-20 unit	antara 5-10 unit	antara 2-4 unit	satu unit
				1	0,75	kurang dari 10 unit	kurang dari 5 unit	kurang dari 2 unit	tidak ada
Pemanfaatan lahan pelabuhan	tahunan	tata kelola dan pelayanan usaha	3	4	3	Sangat optimal (80-100%)	Sangat optimal (80-100%)	Sangat optimal (80-100%)	Sangat optimal (80-100%)
				3	2,25	Optimal (60-79%)	Optimal (60-79%)	Optimal (60-79%)	Optimal (60-79%)
				2	1,5	Cukup Optimal (40-59%)	Cukup Optimal (40-59%)	Cukup Optimal (40-59%)	Cukup Optimal (40-59%)
				1	0,75	kurang Optimal (<40%)	kurang Optimal (<40%)	kurang Optimal (<40%)	kurang Optimal (<40%)

PARAMETER	Waktu Penilaian	PIC	BOBOT (B)	SKALA (S)	Nilai (BxS)/4	STANDAR INDIKATOR			
						PPS	PPN	PPP	PPI
Penyerapan Tenaga Kerja	Bulanan	tata kelola dan pelayanan usaha	3	4	3	diatas 3.000 orang/bulan	diatas 1.500 orang/bulan	diatas 300 orang/bulan	diatas 150 orang/bulan
				3	2,25	antara 2.000-3.000 orang/bulan	antara 1.000-1.500 orang/bulan	antara 200-300 orang/bulan	antara 100-150 orang/bulan
				2	1,5	antara 1.000-2.000 orang/bulan	antara 500 -1.000 orang	antara 100-200 orang/bulan	antara 50-100 orang/bulan
				1	0,75	kurang dari 1.000 orang/bulan	kurang dari 500 orang/bulan	kurang dari 100 orang/bulan	kurang dari 50 orang/bulan



C. Kriteria Penilaian :

Adapun kriteria untuk masing - masing tolok ukur di atas adalah sebagai berikut :

1. Administrasi :

Untuk melihat keaktifan dari UPT dalam melakukan entri data di beberapa aplikasi yaitu:

1) PPIP

Penilaian tertinggi dicapai apabila UPT aktif melakukan entri data di aplikasi PPIP dengan bobot sebesar 4. Standar penilaian untuk kriteria ini adalah ya atau tidak, berlaku untuk UPT Pusat. Apabila UPT aktif melakukan entri data maka bobot yang diperoleh 4, jika tidak aktif, bobot yang diperoleh 1.

2) E-logbook

Penilaian tertinggi dicapai apabila UPT aktif melakukan entri data di aplikasi e-logbook dengan bobot sebesar 2. Standar penilaian untuk kriteria ini adalah ya atau tidak, berlaku untuk UPT Pusat. Apabila UPT aktif melakukan entri data maka bobot yang diperoleh 4, jika tidak aktif bobot yang diperoleh 1.

3) Aplikasi SPB-Online

Penilaian tertinggi dicapai apabila UPT aktif melakukan entri data di aplikasi SPB-Online dengan bobot sebesar 2. Standar penilaian untuk kriteria ini adalah ya atau tidak, berlaku untuk UPT Pusat. Apabila UPT aktif melakukan entri data maka bobot yang diperoleh 4, jika tidak aktif bobot yang diperoleh 1.

4) SHTI

Penilaian tertinggi dicapai apabila UPT aktif melakukan entri data di aplikasi SHTI dengan bobot sebesar 2. Standar penilaian untuk kriteria ini adalah ya atau tidak, berlaku untuk UPT Pusat. Apabila UPT aktif melakukan entri data maka bobot yang diperoleh 4, jika tidak aktif bobot yang diperoleh 1.

5) Aplikasi Inspeksi Pembongkaran Ikan

Penilaian tertinggi dicapai apabila UPT aktif melakukan entri data di aplikasi Inspeksi Pembongkaran Ikan dengan bobot sebesar 1. Standar penilaian untuk kriteria ini adalah ya atau tidak, berlaku untuk UPT Pusat. Apabila UPT aktif melakukan entri data maka bobot yang diperoleh 4, jika tidak aktif bobot yang diperoleh 0.

6) SSKA

Penilaian tertinggi dicapai apabila UPT aktif melakukan entri data di aplikasi Inspeksi Pembongkaran SSKA dengan bobot sebesar 2. Standar penilaian untuk kriteria ini adalah ya atau tidak, berlaku untuk UPT Pusat. Apabila UPT aktif melakukan entri data maka bobot yang diperoleh 4, jika tidak aktif bobot yang diperoleh 1.

7) Realisasi Penyerapan Anggaran

Dasar kriteria ini adalah realisasai anggaran pelabuhan perikanan dengan bobot sebesar 4, berlaku untuk semua UPT Pelabuhan Perikanan.

Apabila realisasai anggaran pelabuhan perikanan antara 75-100% maka bobot yang diperoleh 4, jika realisasai anggaran pelabuhan perikanan antara 50-75% bobot yang diperoleh 3, jika realisasai anggaran pelabuhan perikanan antara 25-50% bobot yang diperoleh 2, dan jika realisasai anggaran pelabuhan perikanan di bawah 25% bobot yang diperoleh 1.

8) Pendapatan Pelabuhan

Dasar kriteria ini adalah pendapatan pelabuhan perikanan dengan bobot sebesar 4, berlaku untuk semua UPT Pelabuhan Perikanan. Apabila pendapatan pelabuhan perikanan di atas 00% maka bobot yang diperoleh 4, jika pendapatan pelabuhan perikanan antara 60-90% bobot yang diperoleh 3, jika pendapatan pelabuhan perikanan antara 30-60% bobot yang diperoleh 2, dan jika pendapatan pelabuhan perikanan di bawah 30% bobot yang diperoleh 1.

9) Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan

Dasar kriteria ini adalah ketersediaan SDM Pengelola sebesar 4, berlaku untuk untuk Semua UPT Pelabuhan Perikanan. Apabila SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan lengkap maka bobot yang diperoleh 4, jika kurang lengkap bobot yang diperoleh 3, dan jika tidak ada bobot yang diperoleh 1.

2. Fasilitas Pelabuhan Perikanan

1) Kapasitas daya tampung kolam pelabuhan

Dasar kriteria ini adalah kapasitas daya tampung kolam pelabuhan dengan bobot sebesar 4. Standar penilaian untuk kriteria ini berbeda untuk masing-masing klas Pelabuhan Perikanan.

Kriteria untuk PPS adalah apabila produksi >6.000 GT bobot yang diperoleh 4, produksi 2.250-6.000GT bobot yang diperoleh 3, dan produksi < 2.250GT bobot yang diperoleh 2.

Kriteria untuk PPN adalah apabila produksi >2.250 GT bobot yang diperoleh 4, produksi 300 – 2.250GT bobot yang diperoleh 3, dan produksi <300 GT bobot yang diperoleh 2.

Kriteria untuk PPP adalah apabila produksi > 300 GT bobot Yang diperoleh 4, Produksi 75- 300 GT bobot yang diperoleh 3, dan produksi < 75 GT bobot yang diperoleh 2.

Kriteria untuk PPI adalah apabila produksi bobot yang diperoleh 4, produksi 30-75 GT bobot yang diperoleh 3, dan produksi < 30 GT bobot yang diperoleh 2.

2) Panjang Dermaga

Dasar kriteria ini adalah Panjang dermaga dengan bobot sebesar 4. Standar penilaian untuk kriteria ini berbeda untuk masing-masing klas Pelabuhan Perikanan.

Kriteria untuk PPS adalah apabila panjang dermaga >300 m bobot yang diperoleh 4, panjang dermaga 150-300m bobot yang diperoleh B, dan panjang dermaga <150 m bobot Yang diperoleh 2.

Kriteria untuk PPN adalah apabila panjang dermaga > 150 m bobot yang diperoleh 4, panjang dermaga 100-150 m bobot yang diperoleh 3, dan panjang dermaga <100 m bobot yang diperoleh 2.

Kriteria untuk PPP adalah apabila panjang dermaga >100 m bobot yang diperoleh 4, panjang dermaga 50-100 m bobot yang diperoleh 3, dan panjang dermaga < 50 m bobot yang diperoleh 2.

Kriteria untuk PPI adalah apabila panjang dermaga >50 m bobot yang diperoleh 4, panjang dermaga 25-50 m bobot yang diperoleh 3, dan panjang dermaga < 25 m bobot yang diperoleh 2.

3) Kedalaman Kolam

Dasar kriteria ini adalah kedalaman kolam pelabuhan dengan bobot sebesar 4. Standar penilaian untuk kriteria ini berbeda untuk masing-masing klas Pelabuhan Perikanan.

Kriteria untuk PPS dan PPN adalah apabila kedalaman kolam pelabuhan > 3 m bobot yang diperoleh 4, kedalaman kolam pelabuhan 1-3 m bobot yang diperoleh 3, dan kedalaman kolam pelabuhan < 1 m bobot yang diperoleh 2.

Kriteria untuk PPP dan PPI adalah apabila kedalaman kolam pelabuhan > 2 m bobot yang diperoleh 4, kedalaman kolam pelabuhan 1-2 m bobot yang diperoleh 3, dan kedalaman kolam pelabuhan < 1 m bobot Yang diperoleh 2.

4) Sarana Perbaikan

Dasar kriteria ini adalah ketersediaan docking dengan bobot sebesar 2. Standar penilaian untuk kriteria ini adalah ada atau tidak, berlaku untuk semua UPT pelabuhan perikanan. Apabila ada jasa docking dan bengkel maka bobot yang diperoleh 4, jika tidak ada bobot yang diperoleh 1.

5) Kelengkapan Fasilitas Pemasaran dan Distribusi Perikanan

Dasar kriteria ini adalah informasi pemasaran dan distribusi perikanan dengan bobot sebesar 2. Standar penilaian untuk kriteria ini adalah dilaporkan atau tidak, berlaku untuk semua pelabuhan perikanan. Apabila ada informasi pemasaran dan distribusi maka bobot yang diperoleh 4, jika tidak ada bobot yang diperoleh 1.

6) Ketersediaan lahan Pelabuhan

Dasar kriteria ini adalah ketersediaan lahan pelabuhan dengan bobot sebesar 4. Standar penilaian untuk kriteria ini berbeda untuk masing-masing klas pelabuhan Perikanan.

Kriteria untuk PPS adalah lahan pelabuhan >20 ha, maka bobot yang diperoleh 4, lahan pelabuhan 10-20 ha maka bobot yang diperoleh 3, lahan pelabuhan 5 -10 ha maka bobot yang diperoleh 2, dan lahan pelabuhan <5 ha maka bobot yang diperoleh 1.

Kriteria untuk PPN adalah lahan pelabuhan > 10 ha maka bobot yang diperoleh 4, lahan pelabuhan 6-10 ha maka bobot yang diperoleh 3, lahan pelabuhan 3-6 ha maka bobot yang diperoleh 2, dan lahan pelabuhan <3 ha maka bobot yang diperoleh 1.

Kriteria untuk PPP adalah lahan pelabuhan >5 ha maka bobot yang diperoleh 4, lahan pelabuhan 3 - 5 ha maka bobot yang diperoleh 3, lahan pelabuhan 1,5 - 3 ha maka bobot yang diperoleh, dan lahan pelabuhan < 1,5 ha maka bobot yang diperoleh 1.

Kriteria untuk PPI adalah lahan pelabuhan > 2 ha maka bobot yang diperoleh 4, lahan 1-2 ha maka bobot yang diperoleh 3, lahan pelabuhan 0,5-1 ha maka bobot yang diperoleh 2, dan lahan pelabuhan < 0,5 ha maka bobot yang diperoleh 1.

3. Pelayanan Publik

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/MEN/2012 tentang Pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan disebutkan bahwa jenis pelayanan publik di KKP antara lain pelayanan jasa publik (jasa pelabuhan perikanan : tambat labuh; jasa pengelolaan modal usaha : pemanfaatan lahan fasilitas pelabuhan perikanan), pelayanan administratif (perizinan, sertifikasi, dan /atau rekomendasi di bidang usaha perikanan tangkap. Adapun tolok ukur untuk kriteria pelayanan publik antara lain :

2) Tambat labuh

Dasar kriteria ini adalah kapasitas tonase kapal dengan bobot sebesar 4. Standar penilaian untuk kriteria ini berbeda untuk masing-masing klas pelabuhan perikanan.

Kriteria untuk PPS adalah apabila kunjungan tonase kapal > 60 GT bobot Yang diperoleh 4, tonase kapal 30-60 GT bobot yang diperoleh 3, dan tonase kapal < 30

GT bobot Yang diperoleh 2.

Kriteria untuk PPN adalah apabila kunjungan tonase kapal > 30 GT bobot yang diperoleh 4, tonase kapal 10-30 GT bobot yang diperoleh 3, tonase kapal < 10 GT bobot yang diperoleh 2.

Kriteria untuk PPP adalah apabila kunjungan tonase kapal > 10 GT bobot yang diperoleh 4, tonase kapal 5-10 GT bobot yang diperoleh 3, dan tonase kapal < 5 GT bobot yang diperoleh 2.

Kriteria untuk PPI adalah apabila kunjungan tonase kapal >5 GT bobot yang diperoleh 4, tonase kapal 2-5 GT bobot yang diperoleh 3, dan tonase kapal < 2 GT bobot yang diperoleh 2.

3) Produksi Perikanan

Dasar kriteria ini adalah produksi perikanan per bulan dengan bobot sebesar 5. Standar penilaian untuk kriteria ini berbeda untuk masing-masing klas pelabuhan Perikanan.

Kriteria untuk PPS adalah apabila apabila produksi > 50 ton per hari bobot yang diperoleh 4, produksi 30 - 50 ton per hari bobot yang diperoleh 3, produksi < 30 ton per hari bobot yang diperoleh 2, dan tidak melaporkan bobot yang diperoleh 1.

Kriteria untuk PPN adalah produksi > 30 ton per hari bobot yang diperoleh 4, produksi 5- 30 ton per hari bobot yang diperoleh 3, produksi < 5 ton per hari bobot yang diperoleh 2, dan tidak melaporkan bobot yang diperoleh 1.

Kriteria untuk PPP adalah produksi > 5 ton per hari bobot yang diperoleh 4, produksi 2- 5 ton per hari bobot yang diperoleh 3, produksi < 2 ton per hari bobot yang diperoleh 2, dan tidak melaporkan bobot yang diperoleh 1.

Kriteria untuk PPI adalah produksi > 2 ton per hari bobot yang diperoleh 4, produksi 1-2 ton per hari bobot yang diperoleh 3, produksi < 1 ton per hari bobot yang diperoleh 2, dan tidak melaporkan bobot yang diperoleh 1.

4) Frekuensi kunjungan kapal

Dasar kriteria ini adalah frekuensi kunjungan kapal dengan bobot sebesar 5. Standar penilaian untuk kriteria ini berbeda untuk masing-masing klas pelabuhan perikanan.

Kriteria untuk PPS adalah apabila kunjungan kapal >14 unit bobot yang diperoleh 4, kunjungan kapal 10-14 unit bobot yang diperoleh 3, kunjungan kapal 5-9 unit bobot yang diperoleh 2, dan kunjungan kapal 1-4 unit bobot yang diperoleh 1.

Kriteria untuk PPN adalah apabila kunjungan kapal >12 unit bobot yang diperoleh 4, kunjungan kapal 9-12 unit bobot yang diperoleh 3, kunjungan kapal 4-8 unit bobot yang diperoleh 2, dan kunjungan kapal 1-3 unit bobot yang diperoleh 1.

Kriteria untuk PPP adalah apabila kunjungan kapal >10 unit bobot yang diperoleh 4, kunjungan kapal 7-10 unit bobot yang diperoleh 3, kunjungan kapal 3-5 unit bobot yang diperoleh 2, dan kunjungan kapal 1-2 unit bobot yang diperoleh 1.

Kriteria untuk PPI adalah apabila kunjungan kapal >7 unit bobot yang diperoleh 4, kunjungan kapal 5-7 unit bobot yang diperoleh 3, kunjungan kapal 2-4 unit bobot yang diperoleh 2, dan kunjungan kapal 1 unit bobot yang diperoleh 1.

5) STBLKK

Dasar kriteria ini adalah terbitnya STBLKK dengan bobot sebesar 5. Standar penilaian untuk kriteria ini adalah jumlah STBLKK per kapal yang masuk, berlaku untuk semua UPT pelabuhan perikanan. Kriterianya adalah apabila STBLKK/ kapal yang masuk = 100% bobot yang diperoleh 4, STBLKK/ kapal yang masuk = 75 -99% bobot yang diperoleh 3, STBLKK/ kapal yang masuk = 50-74% bobot yang diperoleh 2, dan STBLKK/ kapal yang masuk = <50 % bobot yang diperoleh 1.

6) Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (pertemuan)

Dasar kriteria ini adalah sosialisasi per triwulan dengan bobot sebesar 4. Standar penilaian untuk kriteria ini berlaku untuk semua klas pelabuhan. Standar penilaian untuk kriteria ini adalah apabila pertemuan >3 kali

bobot yang diperoleh 4, pertemuan 3 kali bobot yang diperoleh 3, pertemuan 2 kali bobot yang diperoleh 2 dan tidak ada pertemuan bobot yang diperoleh 1.

- 7) **Fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan dan pemasaran serta distribusi hasil Perikanan;**
 Dasar kriteria ini adalah kegiatan yang terselenggara dengan bobot sebesar 4. Standar penilaian untuk kriteria ini berlaku untuk semua klas pelabuhan.
 Standar penilaian untuk kriteria ini adalah apabila pertemuan > 4 kali bobot yang diperoleh 4, pertemuan 3-4 kali bobot yang diperoleh 3, pertemuan 1-2 kali bobot yang diperoleh 2 dan tidak ada pertemuan bobot yang diperoleh 1.
- 8) **Pelaksanaan K5**
 Dasar kriteria ini adalah adanya pelaksanaan K5 dengan bobot sebesar 4, berlaku untuk semua klas pelabuhan perikanan. Kriterianya adalah baik bobot yang diperoleh 4, sedang bobot yang diperoleh 3, kurang bobot yang diperoleh 2, dan sangat kurang bobot Yang diperoleh 1.
- 9) **Penyaluran Air Bersih**
 Dasar kriteria ini adalah jumlah air yang disalurkan ke kapal perikanan dengan bobot sebesar 4. Standar penilaian untuk kriteria ini sama untuk semua klas masing klas pelabuhan perikanan. Standar penilaian untuk kriteria ini adalah apabila penyaluran air bersih sesuai kebutuhan 100% diperoleh 4, jika kebutuhan terpenuhi antara 75-99% diperoleh 3, jika kebutuhan terpenuhi antara 50-74% diperoleh 2, dan jika kebutuhan terpenuhi di bawah < 50% diperoleh 1.
- 10) **Penyaluran Es (Kapal)**
 Dasar kriteria ini adalah jumlah es yang disalurkan ke kapal perikanan dengan bobot sebesar 4. Standar penilaian untuk kriteria ini sama untuk semua klas masing klas pelabuhan perikanan. Standar penilaian untuk kriteria ini adalah apabila penyaluran es sesuai kebutuhan 100% diperoleh 4, jika kebutuhan terpenuhi antara 75-99% diperoleh 3, jika kebutuhan terpenuhi antara 50-74% diperoleh 2, dan jika kebutuhan terpenuhi di bawah < 50% diperoleh 1.
- 11) **Penyaluran BBM (kapal)**
 Dasar kriteria ini adalah jumlah BBM yang disalurkan ke kapal perikanan dengan bobot sebesar 5. Standar penilaian untuk kriteria ini sama untuk semua klas masing klas pelabuhan perikanan. Standar penilaian untuk kriteria ini adalah apabila penyaluran BBM sesuai kebutuhan 100% diperoleh 4, jika kebutuhan terpenuhi antara 75-99% diperoleh 3, jika kebutuhan terpenuhi antara 50-74% diperoleh 2, dan jika kebutuhan terpenuhi di bawah < 50% diperoleh 1.

4. Investasi dan Industri

1) Pelayanan pengolahan hasil perikanan di WKOPP

Dasar kriteria ini adalah jumlah industri/ usaha pengolahan hasil perikanan di WKOPP dengan bobot sebesar 3. Standar penilaian untuk kriteria ini berbeda untuk masing-masing klas pelabuhan perikanan.

Kriteria untuk PPS adalah jumlah industri/ usaha >30 unit bobot yang diperoleh 4, jumlah industri/ usaha 20-30 unit bobot yang diperoleh 3, jumlah industri/ usaha 10-20 unit bobot yang diperoleh 2, dan jumlah industri/usaha <10 unit bobot yang diperoleh 1.

Kriteria untuk PPN adalah jumlah industri/ usaha 15 unit bobot yang diperoleh 4, jumlah industri/ usaha 10-15 unit bobot yang diperoleh 3, jumlah industri/ usaha 5-10 unit bobot yang diperoleh 2, dan jumlah industri/ usaha < 5 unit bobot yang diperoleh 1.

Kriteria untuk PPP adalah jumlah industri/ usaha >6 unit bobot yang diperoleh 4, jumlah industri/ usaha 4-6 unit bobot yang diperoleh 3, jumlah industri/ usaha 2 - 4 unit bobot yang diperoleh 2, dan jumlah industri/ usaha 2 unit bobot yang diperoleh 1.

Kriteria untuk PPI adalah jumlah industri/ usaha >2 unit bobot yang diperoleh 4, jumlah industri/ usaha 2 unit bobot yang diperoleh 3, jumlah industri/ usaha 1 unit bobot yang diperoleh 2, dan tidak ada industri/ usaha bobot yang diperoleh 1.

2) Pemanfaatan lahan pelabuhan (sesuai Rencana Induk)

Dasar kriteria ini adalah pemanfaatan lahan pelabuhan dengan bobot sebesar 3, berlaku untuk semua pelabuhan perikanan. Kriterianya adalah sangat optimal =80 -100% maka bobot yang diperoleh 4, optimal : 60-79% maka bobot yang diperoleh 3, cukup optimal 40-59% maka bobot yang diperoleh 2, dan belum optimal < 40% maka bobot yang diperoleh 1.

3) Penyerapan Tenaga Kerja

Dasar kriteria ini adalah jumlah penyerapan tenaga kerja dengan bobot sebesar 3. Standar penilaian untuk kriteria ini berbeda untuk masing-masing klas pelabuhan perikanan.

Kriteria untuk PPS adalah tenaga kerja >3.000 per bulan maka bobot yang diperoleh 4, 2.000-3000 orang per bulan maka bobot yang diperoleh 3, tenaga kerja 1.000-2.000 orang per bulan maka bobot yang diperoleh 2, tenaga kerja <1.000 orang per bulan maka bobot yang diperoleh 1.

Kriteria untuk PPN adalah tenaga kerja > 1.500 orang per bulan maka bobot yang diperoleh 4, tenaga kerja 1.000 - 1.500 orang per bulan maka bobot yang diperoleh 3, tenaga kerja 500 - 1.000 orang per bulan maka bobot yang diperoleh 2, dan tenaga kerja < 500 orang per bulan maka bobot yang diperoleh 1.

Kriteria untuk PPP adalah tenaga kerja > 300 orang per bulan maka bobot yang diperoleh 4, tenaga kerja 200 - 300 orang per bulan maka bobot yang diperoleh 3, tenaga kerja 100 - 300 orang per bulan maka bobot

yang diperoleh 2, dan tenaga kerja < 100 orang per bulan maka bobot yang diperoleh 1.

Kriteria untuk PPI adalah tenaga kerja > 150 orang per bulan maka bobot yang diperoleh 4, tenaga kerja 100-150 orang per bulan maka bobot yang diperoleh 3, tenaga kerja 50-100 orang per bulan maka bobot yang diperoleh 2, dan tenaga kerja < 50 orang per bulan maka bobot yang diperoleh 1.

D. Hasil Penilaian

Dari hasil evaluasi kinerja pelabuhan perikanan dapat disimpulkan bahwa suatu pelabuhan perikanan dapat memiliki kinerja sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan. Untuk menetapkan kategori penilaian didasarkan pada skor nilai keberhasilan yang diperoleh dari hasil perhitungan yaitu : bobot (A) dikalikan dengan Skala (S) dibagi dengan 4.

Berdasarkan skor Nilai Keberhasilan (NK) maka hasil evaluasi kinerja pelabuhan perikanan dibagi menjadi 4 kategori yaitu :

- 1) Sangat baik jika $NK = (86 - 100)$
- 2) Baik jika $NK = (66-85)$
- 3) Sedang jika $NK : (46- 65)$
- 4) Kurang jika $NK = (0 - 45)$



BAB III PENUTUP

Pedoman ini dikeluarkan untuk menjadi arahan bagi pelaksanaan penilaian terhadap pelabuhan perikanan khususnya yang sudah operasional baik dikelola Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap maupun dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Evaluasi kinerja operasional pelabuhan perikanan merupakan kegiatan manajemen untuk menilai hasil kerja dari pelabuhan perikanan berdasarkan standar indikator yang ada.

Evaluasi kinerja operasional ini sangat dibutuhkan untuk memberikan gambaran kinerja suatu pelabuhan perikanan dan hasilnya dapat dijadikan masukan dalam pengambilan kebijakan terhadap pelabuhan perikanan tersebut.

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

ttd

GELLWYNN JUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas

Heru Satrio Wibowo



LAMPIRAN 3**DOKUMENTASI**

